PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

UNIT KERJA : **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARORI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN**
3. NHK : **753718**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/140 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2480 m2/1 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1696 m2/483 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 810 m2/1 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1720 m2/1 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **231.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI MPNP/MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **53.227.184**

F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.784.227.184
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.784.227.184

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.